

BAB VI

PENUTUP

6.1 KESIMPULAN

Dari uraian yang telah dipaparkan, dapat ditarik kesimpulan mengenai Peran Pemerintah Daerah dalam tata kelola hutan Mangrove desa Nangadhero Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo. Hal ini sangatlah penting dalam melestarikan kawasan hutan Mangrove yang tumbuh dengan sendirinya disekitar pesisir pantai Nangadhero untuk dijadikan sebagai hutan yang berguna bagi masyarakat Nangadhero terutama bagi mereka yang berada disekitar kawasan tersebut. Aspek yang diteliti adalah fungsi layanan (*servicing function*), fungsi pemberdayaan (*empowering function*), fungsi pengaturan (*regulating function*). Berdasarkan indicator-indikator serta hasil analisa yang didukung dengan data yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan dilapangan, maka penulis dapat mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

A. Fungsi layanan (*servicing function*).

Peran pemerintah dalam aspek fungsi layanan memang sudah dilaksanakan dengan baik. Realisasi program dan bentuk pelayanan pemerintah yang sudah dijalankan oleh pemerintah ini mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari masyarakat. Adapun usulan dari masyarakat kepada pemerintah agar segera memperhatikan dan menjawab persoalan kebutuhan akan air bersih untuk masyarakat.

B. Fungsi pemberdayaan (*empowering function*).

Fungsi pemerintah dalam hal pemberdayaan sudah mulai membaik dengan adanya hasil positif dari kegiatan penyuluhan dan pelatihan oleh pemerintah terhadap masyarakat. Peran pemerintah dalam pemberdayaan juga didukung oleh kesadaran masyarakat dan rasa memiliki yang tinggi akan pentingnya hutan Mangrove karena masyarakat bertindak atas kemauan mereka sendiri yang mencerminkan mulai adanya kemandirian.

C. Fungsi pengaturan (*regulating function*).

1. Pemerintah kabupaten melalui dinas terkait sudah melaksanakan tugas mereka dengan baik dalam hal menjaga dan membatasi perilaku masyarakat yang mengancam hutan Mangrove yang dijadikan hutan lindung dengan memberikan rambu-rambu larangan di beberapa tempat.
2. Masyarakat setempat masih bermodalkan aturan perasaan akan kesadaran yang tinggi dimana masyarakat akan ditegur langsung atau di jadikan bahan pembicaraan jika melakukan hal yang salah, karena untuk sementara belum ada aturan yang jelas dari pemerintahan desa dalam hal perlindungan hutan Mangrove.

6.2 SARAN

A. Fungsi layanan (*servicing function*).

1. Pemerintah daerah diharapkan segera memperhatikan dan menyediakan kebutuhan yang mendasar yaitu kebutuhan akan air bersih demi kesejahteraan masyarakat Nangadhero.
2. Diharapkan pemerintah berusaha agar tetap mempertahankan sikap, mental, perlakuan yang adil dan pemerataan yang efektif dalam pelayanan masyarakat.

B. Fungsi pemberdayaan (*empowering function*).

1. Kepada masyarakat setempat diharapkan agar tetap melestarikan kekayaan alam yang ada dan tetap mempertahankan kesadaran, rasa memiliki yang sudah tertanam dalam setiap pribadi mereka sendiri.

C. Fungsi pengaturan (*regulating function*).

1. Diharapkan pemerintah desa Nangadhero segera merancang dan mengeluarkan peraturan desa (Perdes) yang berkaitan dengan tata kelola hutan Mangrove.

DAFTAR PUSTAKA

- Amba. 1998. *Faktor- faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelestarian hutan mangrove (Studi kasus di Kecamatan Teluk Ambon, Baguala)*, Kotamadya Ambon, Maluku.
- Anonimous. 2005. *Hutan bakau*.[http:// oseanografi. blogspot. com/2005/07/Hutan-bakau. html](http://oseanografi.blogspot.com/2005/07/Hutan-bakau.html).
- Anonimous, 2005. *Teknik rehabilitasi mangrove*. Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Direktur Jenderal Rehabilitas Lahan dan Perhutanan Sosial. Departemen kehutanan. 2002. *Kebijakan departemen kehutanan dalam pengolahan ekosistem hutan mangrove. Fungsi dan manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat*.
- Fitriadi. 2004. *Peran Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat dalam rehabilitasi hutan mangrove (Kasus di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat)*. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Haikal. 2008. *Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Iskandar, 2009: *metodologi penelitian kualitatif*, jakarta: persada, halaman 11
- Kartasasmita, Ginandjar. (1996). *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta, CIDES.
- Kusmana, C. 1994. *Manajemen hutan mangrove di Indonesia*. Laboratorium Ekologi Manajemen Hutan Fakultas Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Kusmana, C. 2002. *Pengelolaan Ekosistem Mangrove Secara Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat*. makalah disampaikan pada Lokakarya Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove di jakarta. Agustus 2002.
- Lexi J Moleong, 2010: *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rodakarya,
- Namawi Hadari, 2007: *Metodologi Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Gajah Madah University Press,
- Rasyid, M. Ryaas. 1997. *Makna Pemerintahan: Tujuan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, Jakarta: Yasrif Watampoe.

- Rawana. 2002. *Problematika Rehabilitasi Mangrove Berkelanjutan*. Workshop rehabilitasi mangrove Nasional diselenggarakan oleh. INSTIPER. Yogyakarta.
- Siagian, Sondang. 1983. *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Jakarta. Gunung Agung.
- Sugiyono; 2009: *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta, Halaman 160
- Sugiyono; 2009: *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta, Halaman 247-253. P.
- Suhaeb, Amrani, S. 2000. *Analisis Kebijakan Pengelolaan Ekosistem Hutan Mangrove di Teluk Kendari*. Tesis. Program pascasarjana. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Steenis, V. C. 1978. *Flora. Pradnya paramita*. Jakarta. Tesis. Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Workhsop *Rehabilitasi Mangrove Nasional* Diselenggarakan oleh INSTIPER. Yogyakarta.
- Yuniarti, Ms. 2004. *Analisi kebijakan ekosistem mangrove di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.